

## **KERJASAMA PERTAHANAN RUSIA DAN KOREA UTARA**

**Iman Sukoco<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

The development of global security issues has become increasingly dynamic amidst hegemonic competition in various regional conflicts. The actions and reactions of states in responding to the dynamics of conflict across different regions present a compelling area of study within the field of international relations. One particularly noteworthy security issue that has garnered public attention is the strengthening military relationship between Russia and North Korea, occurring concurrently with the escalating conflict between Russia and Ukraine and the potential for conflict escalation on the Korean Peninsula. This situation is further underscored by the cooperation between Russia and North Korea, which is becoming increasingly focused on enhancing defence and military capabilities. There are a number of responses and projections regarding the negative impacts of the policies adopted by Russia towards North Korea. Consequently, researchers are investigating the underlying reasons for Russia's foreign policy formulation towards North Korea, employing a Neo-Realist perspective and grounded in foreign policy theory. Additionally, the analysis encompasses the determinants of foreign policy and several relevant supplementary theories.

**Keywords: Foreign Policy, Strengthening Russia-North Korea Relations, Regional and Global Security.**

### **ABSTRAK**

Perkembangan isu keamanan global menjadi semakin dinamis di tengah persaingan hegemonik dalam berbagai konflik regional. Tindakan dan reaksi negara-negara dalam menanggapi dinamika konflik di berbagai wilayah menghadirkan bidang studi yang menarik dalam bidang hubungan internasional. Salah satu masalah keamanan yang sangat penting yang telah menarik perhatian publik adalah penguatan hubungan militer antara Rusia dan Korea Utara, yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya konflik antara Rusia dan Ukraina dan potensi eskalasi konflik di Semenanjung Korea. Situasi ini semakin digarisbawahi oleh kerja sama antara Rusia dan Korea Utara, yang menjadi semakin fokus pada peningkatan kemampuan pertahanan dan militer. Ada sejumlah tanggapan dan proyeksi mengenai dampak negatif dari kebijakan yang diadopsi oleh Rusia terhadap Korea Utara. Akibatnya, para peneliti menyelidiki alasan yang mendasari perumusan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Korea Utara, menggunakan perspektif Neo-Realis dan didasarkan pada teori kebijakan luar negeri. Selain itu, analisis mencakup penentu kebijakan luar negeri dan beberapa teori tambahan yang relevan.

**Kata kunci: Kebijakan luar negeri, memperkuat hubungan Rusia-Korea Utara, keamanan regional dan global.**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan keamanan strategis secara global mengalami perubahan yang sangat dinamis. Dalam kajian hubungan internasional dimana negara sebagai salah satu aktor memiliki power untuk mencapai national interestnya, termasuk dengan bekerja sama. Isu keamanan dan pertahanan menjadi bagian isu penting dalam kajian hubungan internasional, seiring dengan perkembangann isu di era globalisasi dimana *sense of common security* antara negara satu dan lainnya menjadi tak terbatas. Seluruh aktor dalam hubungan internasional dituntut memiliki kewajiban untuk menyelesaikan berbagai masalah instabilitas negara, kawasan bahkan dunia.

Beberapa konflik antar negara yang mengalami eskalasi dan perkembangan diantaranya konflik Rusia dan Ukraina, Istra-el-Palestina, Konflik Korea Utara dan Korea Selatan, Konflik China dan Taiwan, dan beberapa konflik lainnya yang terus mengalami sorotan media

internasional sehingga menjadi perhatian dan memancing respon dari berbagai pihak untuk ikut menganalisis dan membantu bersuara menyelesaikan akibat buruk dari konflik yang terjadi.

Adanya *exposure* media dan perkembangan keamanan regional memancing respon negara-negara lain dengan kepentingan nasional mereka untuk melakukan reaksi baik itu dukungan maupun penolakan. Persamaan ideologi dan *common thread* menjadi salah satu alasan sebuah negara merespon terhadap konflik yang terjadi pada kawasan tertentu.

Salah satu yang menarik ialah mengamati perkembangan hubungan diplomatik antara Rusia dan Korea Utara yang semakin lama semakin intensif dalam banyak bidang, termasuk sektor pertahanan dan keamanan. Di tengah kekhawatiran dunia internasional atas meningkatnya potensi perang nuklir. Pada tanggal 19 Juni 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin, melakukan kunjungan ke Pyongyang, Korea Utara, dalam rangka memenuhi undangan Presiden Korea Utara, Kim Jong Un, untuk meratifikasi pakta pertahanan utama (Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Republik Rakyat Demokratik Korea dan Federasi Rusia). Namun demikian, baik Rusia maupun Korea Utara tidak mempublikasikan teks perjanjian keamanan tersebut. Belum jelas bentuk dukungan apa yang akan diberikan, dan hanya sedikit rincian perjanjian yang dipublikasikan (CNBC Indonesia 2024).

Putin kemudian menggambarkan perjanjian tersebut sebagai "defensif", dengan alasan hak Korea Utara untuk membela diri. Dia menambahkan bahwa Rusia tidak akan mengesampingkan peningkatan kerja sama teknis militer dengan Korea Utara. Pakta tersebut akan mengarah pada kerja sama politik, ekonomi dan militer yang lebih erat, katanya, seraya memuji perjanjian tersebut sebagai "mempercepat penciptaan dunia multipolar baru" (CNBC Indonesia 2024). Pada intinya pakta tersebut mencakup ketentuan mengikat kedua negara untuk saling membantu dalam militer jika terjadi serangan salah satu pihak. Perjanjian tersebut juga untuk membina kemitraan komprehensif yang didasarkan pada rasa saling menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah, kesetaraan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri (AA.com 2023)

Peningkatan hubungan bilateral tersebut dikarenakan: Pertama, memiliki potensi kesepakatan terhadap pengembangan sistem persenjataan bersama, termasuk satelit pengintai. Kedua, menjadi peluang memperluas kerja sama ekonomi, di saat warga Korea Utara dilarang bekerja di luar negeri sebagai sanksi Dewan Keamanan PBB. Ketiga, melanjutkan kerja sama di bidang sosial dan budaya, terutama pada aspek layanan pariwisata antara Korea Utara dan Rusia. Berbeda dengan kunjungan Putin ke Korea Utara pada 19 Juli 2000 yang menyepakati bahwa kedua negara akan segera menghubungi jika terjadi invasi atau situasi berbahaya. Kunjungan Putin tahun 2024 dinilai para ahli mengarah dari level kontak ke aliansi. Ditambah lagi situasi setelah perang di Ukraina dan kepemilikan Korea Utara atas senjata nuklir, strategi diplomatik Rusia dan Korea Utara kini menantang pengaruh Amerika menuju tatanan dunia yang multipolar. (Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI 2023).

Hal ini memicu kekhawatiran negara-negara barat mengenai persekutuan militer antara Rusia dan Korea Utara (Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI 2023). Menurut Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte: "Keselarasan yang semakin erat antara Rusia, Korea Utara, Tiongkok, dan Iran menunjukkan sifat ancaman global yang kita hadapi, termasuk bahaya eskalasi dari perang yang sedang berlangsung di Ukraina. (Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI 2023).

Menanggapi fenomena tersebut, Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Chang Ho-jin bahwa "Moskow harus mempertimbangkan mana di antara Korea Utara dan Korea Selatan yang lebih penting bagi mereka, setelah Rusia mengakhiri perangnya dengan Ukraina". (BBC News 2023). Namun demikian, di hadapan Dewan Keamanan PBB, utusan Rusia Vasily Nebenzya menegaskan bahwa interaksi militer negaranya dengan Korea Utara sejalan dengan hukum

internasional dan tidak ditujukan untuk melawan negara ketiga (Kompas.com 2023). Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song juga menegaskan hak negaranya untuk memperkuat hubungan dengan Rusia, dan menyebut bahwa ancaman terbesar bagi perdamaian justru datang dari Amerika dan sekutunya (Kompas.com 2023).

Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara tersebut memunculkan berbagai respon, pengaruh, dan dampak dari dan bagi sektor dan negara lain dalam rivalitas yang berbeda. Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengungkapkan bahwa kerja sama ini mengancam Eropa, semenanjung Korea, dan kawasan sekitarnya, serta memperingatkan bahwa eskalasi ini memperburuk konflik Ukraina (Kompas.com 2023). Hal tersebut juga diperkuat menurut Rachel Lee, peneliti senior bidang Korea di lembaga kajian Stimson Center, mengatakan perjanjian semacam itu akan memiliki "implikasi signifikan bagi kawasan dan dunia" yaitu : Pertama, adanya kemungkinan intervensi Rusia dalam konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara; dan Kedua, masalah proliferasi [senjata] global yang lebih besar apabila Korea Utara terus memasok senjata ke Rusia, dan Rusia memberikan teknologi militer canggih kepada Korea Utara. (BBC News 2023).

Dengan demikian, dengan berbagai respon dan dampak yang mungkin muncul dari kebijakan Rusia dan realasinya dengan Korea Utara tersebut, Peneliti tertarik untuk meneliti alasan apa saja yang melatarbelakangi Pemerintah Rusia semakin memperlihatkan peningkatan hubungan bilateralnya dengan Korea Utara ditengah konflik di kawasan baik di kawasan, baik Semenanjung Korea dan Kawasan Perbatasan Rusia dengan Ukraina. Dengan Judul "Alasan dan Proyeksi Kebijakan Pertahanan Rusia Meratifikasi Pakta Pertahanan Utama dengan Korea Utara terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan". Peneliti menggunakan perspektif Neo-Realisme klasik dan framework teori determinan pembuatan kebijakan luar negeri.

## **KERANGKA ANALITIK**

Teori realisme neoklasik muncul pasca perang dingin pada awal 1990-an. Realisme neoklasik merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan elemen sistem, struktur dan politik domestik, serta faktor material dan ideasional untuk menganalisa hubungan internasional dari perspektif yang plural (Rosyidin 2010). Penganut realisme neoklasik berpandangan bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh posisi negara tersebut dalam sistem internasional dan secara khusus ditentukan berdasarkan kapabilitas kekuatan material relatif. Realisme neoklasik mengintegrasikan tingkat analisa unit (realisme klasik) dan tingkat analisa struktur (neorealisme) sehingga memadai untuk memahami perilaku negara di arena internasional (Kitchen 2010). Realisme neoklasik sebagai multi-level analisis yang menggabungkan faktor internasional dan domestik dapat menghubungkan pengaruh dari faktor sistemik terhadap pertimbangan domestik untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri (Ford 2009). Realisme neoklasik khususnya berkaitan dengan sumber dan penggunaan kekuatan nasional dalam politik internasional dan permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin dalam membuat kebijakan luar negeri (Ford 2009). Dalam teori Neo-Realisme Klasik, Gideon Rose menjelaskan bahwa tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara, pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai determinan, antara lain determinan domestik dan determinan internasional (Ford 2009).

Oleh karena itu dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang dibuat oleh sebuah negara, selain berfokus untuk menjelaskan determinan-determinan internasional yang berasal dari luar

negara, teori *Neo-Classical Realism* juga menjelaskan pentingnya determinan-determinan domestik yang ada di dalam negeri, aatau yang disebut juga sebagai *Innenpolitik* (Ozdamar 2009).

Determinan domestik antara lain terdiri dari keyakinan ideologis, preferensi elit politik, persepsi ancaman, opini publik, dan juga kekuatan relatif (*relative power*): (Ozdamar 2009).

- a. Ideologis dan prinsip ialah bagaimana prinsip yang dianut oleh sebuah negara dan masyarakat di dalamnya mempengaruhi cara pandang nasional dan juga kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut.
- b. Preferensi Elit Politik. Terkait bagaimana opini, pengalaman, dan kepentingan elit-elit politik seperti Kementerian yang ada di dalam suatu negara dapat mempengaruhi proses kebijakan negara tersebut.
- c. Persepsi Ancaman. terkait kekuatan militer dan kesamaan identitas dapat mempengaruhi persepsi ancaman yang dibuat oleh negara terkait suatu isu.

Selain determinan domestik, keberadaan determinan internasional juga diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Beberapa determinan internasional, antara lain: (Ozdamar 2009)

- a. Tekanan Sistem Internasional. Yaitu yang berasal dari tindakan yang dilakukan oleh negara lain sehingga mempengaruhi sistem internasional.
- b. Peraturan dan Perjanjian Internasional yang dapat mempengaruhi atau mendasari tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh negara.
- c. Pola interaksi antara negara-negara yang terlibat, baik kerja sama, kompetisi, anarki, dan lain-lain.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian yang menitikberatkan pada peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat sebagai subjek penelitian utama. Pendekatan ini membahas berbagai aspek penelitian seperti sudut pandang, motivasi, aktivitas, perspektif, dan perilaku masyarakat secara mendalam dengan menggunakan metode terkait (Moleong 2006). Penjelasan terkait menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan pendekatan yang memiliki fokus bahasan dalam permasalahan atau isu sosial, yakni pendekatan yang digunakan dalam meneliti, menganalisa, mengobservasi, hingga memahami secara deskriptif melalui kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya pendekatan ini menjadi metode penelitian yang cocok untuk digunakan dalam permasalahan sosial seperti ini, keadaan tersebut didasari oleh kenyataan bahwa pendalaman permasalahan dalam metode ini berfokus mengenai tingkah laku manusia dengan segala faktor-faktor atau alasan yang mempengaruhi tindakan tersebut.

Tahapan lanjut yang dibahas dalam bagian ini adalah mengenai tipe penelitian, yang mana hal ini memiliki kegunaan untuk menunjukkan bagaimana sebuah penelitian memberikan interpretasi argumen dan menyampaikan hasil yang telah ditemukan. Jenis penelitian yang digunakan pada Tesis ini telah disebutkan oleh peneliti pada bagian awal bab ini, yaitu deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penjelasan melalui catatan, analisis, gambaran, dan interpretasi terhadap seluruh kondisi, fenomena, dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Deskriptif analisis bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang aktual dan nyata, sehingga peneliti dapat melakukan pendekatan, gambaran, dan

analisis terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan fenomena yang diamati. (Mardalis Jakarta). Berikut merupakan beberapa ciri dari tipe penelitian deskriptif:

1. Menjelaskan secara deskriptif terkait fenomena, peristiwa sosial, maupun kejadian-kejadian yang terjadi secara aktual dan faktual.
2. Memberikan penjelasan yang deskriptif terkait subjek penelitian yang sedang dibahas dan dikelola terkait kelompok-kelompok peneliti dalam jangka waktu penelitian yang telah ditentukan bersama.
3. Tipe penelitian deskriptif ini tidak melakukan pengujian terkait hipotesis, namun melakukan proses interpretasi atau pemahaman secara apa adanya tentang apa saja yang telah terjadi pada objek penelitian yang dipengaruhi faktor-faktor terkait.
4. Melakukan pencarian terkait data-data yang dianggap dapat memberikan informasi menarik dan aktual, proses ini dilaksanakan secara mendetail sehingga proses identifikasi permasalahan mendapatkan pembenaran dari peristiwa yang sedang terjadi (Danim 2002):

Jenis penelitian analisis deskriptif pada akhirnya merupakan suatu tipe yang masih termasuk dalam pendekatan kualitatif, yang mana terdapat sebuah pengolahan data yang dilaksanakan terhadap sumber-sumber relevan yang dijelaskan secara deskriptif terkait suatu peristiwa dan fenomena. Studi yang dilakukan tidak memberikan penjelasan statistik (pengolahan data numerik), namun pada prinsipnya penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai pendekatan alternatif. Pada pendekatan ini penelitian berfokus untuk memberikan penjelasan secara deskriptif (untaian kata), yang mana hal ini peneliti anggap lebih efektif untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena dalam lingkup hubungan internasional terjadi dan disampaikan.

Metode penelitian kualitatif memberikan pembahasan yang diutamakan atau difokuskan pada subjek penelitiannya, yaitu membahas mengenai sudut pandang peneliti terkait sebuah peristiwa, fenomena, kejadian, maupun beberapa kasus terkait dengan berbagai data yang relevan dalam menunjukkan beberapa potensi serta kelebihan dari penelitian yang dilaksanakan (Creswell 2018). Penjelasan ini menyebutkan bahwa metode penelitian memang pada akhirnya akan membahas mengenai tingkah laku manusia dan pendalamannya sebagai subjek penelitian, dalam hal ini pendalaman tersebut didasari oleh beberapa faktor pendukung yang berpengaruh dalam fenomena terkait seperti peristiwa, aktivitas, fenomena, bahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan tujuan memperoleh jawaban dari observasi yang dilaksanakan. Pendalaman yang dilakukan memiliki tujuan agar peneliti dapat lebih memahami fenomena yang disampaikan, sehingga pembahasan yang diberikan dapat lebih relevan dengan permasalahan.

Sumber data yang bersifat deskriptif memang menjadi sesuatu hal yang utama dalam sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana proses mencari dan menemukan data maupun informasi terkait permasalahan yang diangkat merupakan bentuk dukungan terhadap pendapat maupun argumen yang peneliti sampaikan. Pada pendekatan ini kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian, memahami segala permasalahan dan aspek penelitian, serta beberapa hal lain terkait kapabilitas dirinya menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh peneliti, dalam hal ini peneliti menjadi subjek penting dalam pendekatan kualitatif yang mana kemampuan dan kapabilitasnya harus diperhatikan secara seksama untuk hasil yang lebih maksimal.

Pada akhirnya tipe penelitian deskriptif analisis menjadi sebuah penelitian yang termasuk dalam pendekatan metode kualitatif yang digunakan, dalam hal ini terdapat proses olah data yang

dilakukan kepada sumber-sumber terkait untuk kelak dijelaskan secara deskriptif terkait peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi dan disajikan dalam laporan yang berisi uraian kata-kata. Penelitian yang dilaksanakan tidak memberikan penjelasan secara statistik (pengolahan data angka), walaupun pada dasarnya penelitian ini dapat dilaksanakan menggunakan metode penelitian kuantitatif sebagai pendekatan alternatifnya.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Hubungan Rusia dan Korea Utara**

Sejarah hubungan Rusia dan Korea Utara secara historis mengalami pasang surut. Dimana hubungan kedua negara sempat memburuk pasca keruntuhan Uni Soviet pada Perang Dunia II. (BBCNews 2022). Pada rentan waktu tahun 1945-1948 Pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea berakhir setelah kekalahan Tokyo dalam Perang Dunia II tahun 1945. Semenanjung Korea akhirnya dibagi menjadi dua bagian: Korea Utara yang didukung Soviet dan Korea Selatan yang didukung AS. Militer Soviet mengangkat Kim Il Sung, mantan pemimpin gerilya yang melawan pasukan Jepang di Manchuria, menjadi pemimpin di Korea Utara. (Internasional Kompas 2022). Selama Perang Dingin, Kim Il Sung berusaha menjaga hubungan dengan Rusia dan China sehingga menjadi sekutu yang baik bagi keduanya tanpa bergantung secara eksklusif kepada salah satu dari mereka dan mencoba mengambil keuntungan dari permusuhan kedua negara (BBCNews 2022)

Rusia juga telah lama mendukung Korea Utara dalam Perang Korea sejak tahun 1950 hingga 1953 (BBCNews 2022). Dimana pada tahun tersebut, Pasukan Kim Il Sung melancarkan serangan mendadak terhadap Korea Selatan pada Juni 1950. Serangan itu memicu Perang Korea. Konflik itu melibatkan pasukan dari Republik Rakyat Tiongkok yang baru dibentuk, didukung angkatan udara Soviet. Pasukan dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di bawah pimpinan PBB berjuang untuk menghadapi invasi tersebut. Gencatan senjata tahun 1953 menghentikan pertempuran dan meninggalkan Semenanjung Korea dalam keadaan teknis perang (Internasional Kompas 2022). Hubungan kedua negara mulai membaik ketika rezim Joseph Stalin membantu Kim Il Sung yaitu kakek dari Kim Jong Un dengan membangun sistem yang serupa dengan Uni Soviet namun menggunakan kekhasan budaya dan tradisi Korea (BBCNews 2022).

Pada pertengahan 1950-an hingga 1960-an pada saat Uni Soviet terus memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Korea Utara, tetapi hubungan mereka memburuk ketika Kim Il Sung dengan keras membersihkan faksi pro-Soviet dan pro-Tiongkok dalam kepemimpinannya untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Sehingga Rusia berupaya mengurangi bantuan tetapi tidak memutuskannya hingga akhir Perang Dingin. (Internasional Kompas 2022). Dalam perjanjian 1961 yang ditandatangani Kim Il Sung dan Nikita Khrushchev mengikat Soviet untuk mempertahankan Korut jika terjadi serangan. Kim Il Sung pernah mengunjungi Moskwa pada 1984. Pada 1986, dia bertemu dengan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev untuk kali pertama. (Kompas Internasional 2022).

Hingga pada tahun 1970-an ketika persaingan antara Uni Soviet dan Tiongkok semakin intensif, Korea Utara mengadopsi kebijakan "kedekatan seimbang" yang memungkinkannya memanfaatkan persaingan antara dua raksasa komunis yang saling bermusuhan untuk mendapatkan lebih banyak bantuan dari keduanya. Pyongyang juga berusaha mengurangi ketergantungannya pada Moskwa dan Beijing, tetapi serangkaian kegagalan kebijakan setelah meminjam dari pasar keuangan internasional mendorong ekonomi Korea Utara ke dalam keterpurukan selama beberapa dekade. Kemudian pada tahun 1980-an Setelah Mikhail Gorbachev naik ke tampuk kekuasaan, Uni Soviet mulai mengurangi bantuan kepada Korea Utara dan mendukung rekonsiliasi dengan Korea Selatan. Seoul juga memperluas hubungan

diplomatiiknya dengan negara-negara komunis di Eropa Timur, meninggalkan Pyongyang semakin terisolasi (Internasional Kompas 2022).

Pascal runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 sekaligus menghilangkan pendukung ekonomi dan keamanan utama Korea Utara. Pemerintahan pasca-komunis di Moskow yang dipimpin Presiden Boris Yeltsin tidak menunjukkan antusiasme untuk terus memberikan bantuan dan subsidi perdagangan kepada Korea Utara. Rusia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Seoul dengan harapan menarik investasi dari Korea Selatan (Internasional Kompas 2022). Pasca 1991 adanya uji coba nuklir dan rudal oleh Korea Utara menjauhkan hubungannya dengan Rusia karena Rusia menganggap tidak ada negara lain lagi yang memiliki kemampuan nuklir, sehingga membuat hubungan kedua negara semakin menjauh dan Korea Utara lebih dekat dengan China pada saat itu (Internasional Kompas 2022). Hal tersebut menyebabkan hubungan dekat antara Korea Utara dengan Uni Soviet merenggang. Namun hal terpenting pada tahun 1991-1998 Rusia telah mengajarkan sebuah pelajaran penting tentang bagaimana perubahan ekonomi yang layak dapat dijalankan walaupun terdapat oposisi politik yang sangat hebat. Sepanjang tahun itu, Yeltsin memasukkan beberapa pembaharu ekonomi ke dalam pemerintahannya (Defence Intelligence Agency 2017).

Hubungan keduanya kembali dipulihkan pada 2000-an ketika Rusia mencari dukungan di tengah perselisihan baru dengan Barat. Vladimir Putin aktif memulihkan hubungan Rusia dengan Korea Utara dibuktikan Ketika Presiden Putin mengunjungi Pyongyang pada Juli tahun 2000 untuk bertemu dengan Kim Jong Il, pemimpin Korea Utara generasi kedua. Kedua pemimpin tersebut menyusun rencana pertahanan bersama. Kunjungan ini dianggap sebagai pernyataan Rusia bahwa negara tersebut akan bekerja untuk mengembalikan pengaruh tradisionalnya karena kesenjangan antara Rusia dan Barat dalam isu keamanan semakin membesar. Putin menjadi tuan rumah pertemuan lanjutan dengan Kim Jong Il di Rusia pada tahun 2001 dan 2002.

Pada 2001 dan 2002, Kim Jong Il melakukan perjalanan ke Rusia untuk berbicara dengan Putin. Pada 2003, dengan meningkatnya kekhawatiran internasional tentang Korut yang secara diam-diam mengembangkan senjata nuklir, Rusia mengambil bagian dalam putaran pertama perundingan enam negara agar Pyongyang meninggalkan program senjata nuklirnya (Internasional Kompas 2022) Hal tersebut menyebabkan Rusia dua kali mendukung sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal yang pada saat itu masih berkembang. Rusia ikut serta dalam pembicaraan yang bertujuan untuk membujuk Korea Utara agar meninggalkan program nuklirnya dengan imbalan keamanan dan manfaat ekonomi. Pembicaraan ini, yang juga melibatkan AS, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang pada Desember 2008 (Kompas Internasional 2022).

Kim Jong Il melakukan perjalanan ketiga dan terakhirnya ke Rusia pada 2011, empat bulan sebelum dia meninggal. Putranya Kim Jong Un untuk selanjutnya mengambil alih kepemimpinan (Internasional Kompas 2022). Hingga pada tahun 2012, Rusia setuju untuk menghapus 90 persen dari utang Korea Utara yang diperkirakan mencapai 11 miliar dollar AS (Internasional Kompas 2022).

Hingga pada periode tahun 2016 hingga 2017, Presiden Kim Jong Un mempercepat uji coba senjata nuklir dan rudal dan memulai diplomasi dengan Washington dan Seoul untuk memanfaatkan program nuklirnya demi keuntungan ekonomi. Ia juga mencoba meningkatkan hubungan dengan sekutu lamanya, Tiongkok dan Rusia. Namun pertemuannya gagal dengan Amerika Serikat, sehingga Kim Jong Un melakukan kunjungan ke Vladivostok, Rusia Timur, untuk pertemuan pertamanya dengan Putin pada April 2019. Mereka berjanji untuk memperluas kerja sama, tetapi pertemuan itu tidak menghasilkan hasil yang substansial. Hingga tahun 2022 Korea Utara memanfaatkan perang Rusia di Ukraina sebagai distraksi untuk meningkatkan uji coba senjatanya. Secara bersamaan, Korea Utara menyalahkan Amerika Serikat atas konflik

Rusia-Ukraina tersebut. Pyongyang menyatakan bahwa "kebijakan hegemonik" Barat memberikan alasan kepada Putin untuk mempertahankan Rusia dengan mengirim pasukan ke negara tetangga. Korea Utara bergabung dengan Rusia dan Suriah dalam mengakui kemerdekaan dua wilayah yang didukung Rusia di Ukraina Timur dan mengisyaratkan minat untuk mengirim pekerja konstruksi ke wilayah tersebut demi membantu dalam upaya pembangunan. Rusia dan Tiongkok menghalangi upaya yang dipimpin AS di Dewan Keamanan untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara terkait uji coba rudal yang semakin intensif. (Internasional Kompas 2022).

Pada 12 September 2023, Kim Jong-Un bertemu Putin. Sejak pertemuan ini, para pejabat AS dan Korea Selatan menyebut hubungan Korea Utara dan Rusia telah meningkat dan hangat. (RCTI Plus.com 2022). Pertemuan ini menyusul kunjungan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, ke Korea Utara pada Juli dan kehadirannya dalam parade militer besar di mana Kim memamerkan rudal jarak jauh yang dirancang untuk menargetkan daratan Amerika Serikat (RCTI Plus.com 2022). Pada 19 Juni 2024 Presiden Putin dan Kim Jong Un meresmikan kerjasama strategis dengan komitmen jika salah satu negara diserang atau terlibat dalam konflik, negara lainnya harus memberikan bantuan militer dan bentuk bantuan lainnya tanpa penundaan untuk mendukung hak membela diri (Pacis Unpar 2022). Kunjungan Putin tahun 2024 dinilai para ahli mengarah dari level kontak ke aliansi (Berkas DPR.go 2022).

Hal tersebut sejalan dengan konsep Aliansi dimana Aliansi ditujukan untuk memajukan kepentingan bersama diantara negara anggota. Aliansi dapat dikendalikan untuk mencegah atau memenangkan sebuah perang. Sistem keseimbangan kekuatan cenderung mendorong pakta militer untuk mengimbangi perubahan dalam keseimbangan kekuatan (Plano 1982). Aliansi militer biasanya dibangun dengan landasan kesamaan visi dan tujuan. Dalam perkembangannya, sebuah aliansi militer tidak hanya fokus pada tujuannya sebagai sebuah pakta militer tapi mulai cenderung melebarkan jangkauan keranah politik, ekonomi, dan Sosial. Aliansi menurut Jack C. Plano dan Roy Olton diartikan sebagai bentuk perjanjian untuk saling mendukung secara militer jika salah satu negara penandatanganan perjanjian diserang atau mendapat ancaman dari negara lain (Plano 1982).

16 Januari 2024, Menteri Luar Negeri Korea Utara bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskwa (Internasional Kompas 2022). Penguatan kerjasama tersebut muncul pasca bergabungnya Korea Selatan dan Ukraina kepada North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Tempo.com 2022). Selain itu kemitraan mencakup Pembangunan ekonomi yang menjadi hal yang sangat penting bagi industri Korea Utara ditengah banyaknya sanksi internasional yang didapatkan. Disisi lain keuntungan bagi Rusia ialah mendapatkan tenaga kerja dari Korea Utara yang dapat dibayar dalam rubel (Pacis Unpar 2022). Hal tersebut diumumkan melalui media resmi Pemerintah Korea Utara (KCNA) pada 20 Juni 2024 yang meluncurkan teks lengkap dari pakta pertahanan bersama yang ditandatangani sehari lalu oleh pemimpin Korut Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Perjanjian itu yang menurut Kim Jong Un akan meningkatkan hubungan bilateral menjadi sesuatu yang mirip dengan "aliansi". Secara resmi diberi nama "Perjanjian tentang Kemitraan Strategis Komprehensif". Pakta tersebut mulai berlaku setelah ratifikasi kecuali salah satu pihak menundans (Kompas.com 2023). Berikut adalah beberapa poin penting dari perjanjian tersebut:

1. Mengembangkan kemitraan tetap berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan negara, tidak melakukan agresi terhadap wilayah, tidak mencampuri urusan dalam negeri dan kesetaraan, serta prinsip hukum internasional lainnya.
2. Bertujuan untuk stabilitas strategis global dan tatanan internasional baru yang adil dan setara, serta memperkuat kerja sama strategis dan taktis.
3. Mengaktifkan saluran komunikasi tanpa penundaan jika salah satu pihak menghadapi ancaman langsung potensi agresi bersenjata.

4. Segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dengan menggunakan segala cara yang tersedia jika salah satu pihak berada dalam keadaan perang.
5. Tidak menandatangani perjanjian apa pun dengan negara ketiga yang melanggar kepentingan inti pihak lain, atau mengizinkan wilayah digunakan oleh negara ketiga yang berupaya melanggar keamanan dan kedaulatan negara lain.
6. Mendukung kebijakan cinta damai untuk melindungi kedaulatan, keamanan dan stabilitas, serta secara aktif bekerja sama dalam membangun tatanan dunia baru yang adil dan multipolar.
7. Bekerja sama dengan PBB dan organisasi internasional lainnya dalam isu-isu yang menjadi kepentingan dan keamanan bersama, dan saling mendukung akses satu sama lain pada entitas terkait.
8. Mempersiapkan langkah-langkah untuk mengambil tindakan bersama guna memperkuat kemampuan pertahanan dengan tujuan mencegah perang dan menjamin perdamaian dan keamanan regional serta internasional.
9. Bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan ancaman di bidang-bidang yang mempunyai kepentingan strategis, termasuk pangan, keamanan energi, teknologi informasi dan komunikasi, perubahan iklim, kesehatan dan rantai pasokan.
10. Memperluas kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, investasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendukung zona ekonomi khusus atau bebas kedua belah pihak.
11. Mendukung kerja sama regional dan lintas batas, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk membangun hubungan ekonomi dan perdagangan langsung antara wilayah perbatasan kedua belah pihak, seperti dengan membentuk badan usaha dan mengadakan forum dan pameran.
12. Memperkuat pertukaran di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, olahraga, budaya dan pariwisata, dan mengupayakan kerja sama dalam perlindungan lingkungan, pencegahan bencana alam, dan penghapusan konsekuensinya.
13. Mempromosikan saling pengakuan terhadap standar produk, catatan pengujian dan sertifikat kualitas, serta mengembangkan pelatihan ahli dan pertukaran hasil pengujian.
14. Melindungi hak dan kepentingan hukum badan hukum dan warga negara pihak lain, serta bekerja sama dalam memberikan bantuan hukum, ekstradisi dan pemindahan orang, serta pengembalian aset yang diperoleh melalui cara pidana.
15. Memperdalam pertukaran lembaga legislatif dan penegakan hukum.
16. Menentang tindakan pemaksaan sepihak yang menargetkan masing-masing pihak sebagai tindakan ilegal dan melanggar Piagam PBB dan norma hukum internasional, dan mengoordinasikan upaya untuk memblokir tindakan tersebut
17. Bekerja sama untuk mengatasi tantangan dan ancaman di bidang terorisme internasional, ekstremisme, kejahatan terorganisir transnasional, perdagangan manusia, penyanderaan, imigrasi ilegal, aliran dana ilegal, pencucian uang, pendanaan untuk penyebaran senjata pemusnah massal. Serta tindakan ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan penerbangan sipil dan navigasi maritim, serta produksi dan distribusi obat-obatan dan produk psikotropika.
18. Mempromosikan kerja sama di bidang keamanan informasi, mengadvokasi persamaan hak dalam mengelola jaringan informasi dan komunikasi, dan menentang penyalahgunaan teknologi tersebut untuk menodai martabat dan citra negara-negara berdaulat serta melanggar hak-hak mereka.
19. Mempromosikan kerja sama di bidang urusan masyarakat dan publikasi, serta mendorong penyebaran literatur masing-masing.
20. Memberikan informasi objektif tentang satu sama lain, dan bekerja sama untuk memerangi informasi palsu serta kegiatan propaganda yang provokatif.

### **Risiko dan Respon Negara Lain terkait Kerjasama Pertahanan Rusia dan Korea Utara**

Berbagai tekanan dunia internasional muncul pada saat deklarasi komitmen pertahanan Rusia dan Korea Utara dirilis media. Hal tersebut memancing risiko bagi Rusia atas berbagai respon penolakannya hingga sanksi-sanksi yang diberikan negara Barat. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengecam "kerja sama militer yang semakin erat dan mengecam kerja sama militer termasuk transfer senjata yang sedang berlangsung yang melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh sebab itu Amerika Serikat juga akan memperkuat aliansi dengan Korea Selatan dalam mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di seluruh dunia. Pada Tanggal 24 Juni 2024, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang membuat pernyataan bersama yang mengutuk peningkatan kerja sama militer Korea Utara dan Rusia. Ketiga negara juga menganggap bahwa transfer senjata antara kedua negara tersebut memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina, dan melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB, dan mengancam stabilitas di Asia Timur Laut dan Eropa (Tempo Internasional 2022), Ketiga negara mengatakan kerjasama Rusia dan Korea Utara harus menjadi perhatian serius bagi upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea (Tempo Internasional 2022).

Korea Selatan juga bereaksi terhadap perkembangan hubungan Rusia dan Korea Utara, melalui Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun menyatakan bahwa meskipun pengiriman pasukan ini mungkin tidak langsung memicu perang di Semenanjung Korea, tetapi dapat meningkatkan ancaman keamanan (CNBC Indonesia 2022). Austin dan Kim pun menyerukan kepada Korea Utara untuk menarik pasukan mereka. Menurut para pejabat AS, penggunaan tentara Korea Utara menunjukkan bahwa kekuatan militer Rusia telah menurun akibat kerugian yang signifikan dalam lebih dari dua tahun konflik di Ukraina (CNBC Indonesia 2022).

Sejak dimulainya perang, Korea Selatan enggan untuk langsung mengirim senjata mematikan ke Ukraina dan sebagian besar telah memberikan dukungan ekonomi dan kemanusiaan. Namun, perkembangan baru ini mungkin memaksa Seoul untuk mempertimbangkan mendukung Kyiv dengan mengirimkan senjata, berbagi intelijen, dan mengirim personel intelijen militer. Jika Seoul memutuskan untuk mengirim senjata ke Kyiv, langkah tersebut akan memerlukan revisi legislatif substantif terhadap Undang-Undang Perdagangan Luar Negerinya; Korea Selatan saat ini dilarang mengirim senjata mematikan ke zona konflik aktif kecuali untuk penggunaan damai, dan negara-negara yang membeli senjata Korea Selatan tidak dapat mengekspornya kembali ke negara pihak ketiga tanpa izin Seoul.

Pada tanggal 28 Oktober, delegasi pejabat intelijen dan pertahanan Korea Selatan memberi pengarahan kepada Dewan Atlantik Utara NATO dan mitra Indo-Pasifik mengenai penilaian mereka terhadap pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia dan berjanji untuk melanjutkan koordinasi dalam memantau situasi di Ukraina. Peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dan NATO akan memungkinkan Seoul untuk berbagi dan menerima informasi mengenai kemampuan dan taktik tempur Korea Utara serta melacak pasukan Korea Utara yang dikirim ke garis depan Ukraina. Korea Selatan juga dapat membantu Ukraina dalam melaksanakan operasi psikologis untuk mendorong tentara Korea Utara membelot (Brookings n.d.).

Kemudian pada 21 Juni 2024 Kementerian luar negeri Korea Selatan memanggil duta besar Rusia sebagai protes atas perjanjian antara Rusia dan Korea Utara yang ditandatangani di Pyongyang. Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Kim Hong-kyun menyampaikan sikap Seoul mengenai pakta tersebut dan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara kepada Georgy Zinoviev, utusan utama Rusia untuk Seoul, kata kementerian luar negeri Seoul. Kim mengatakan kepada Zinoviev bahwa dukungan militer Rusia terhadap Korea Utara membahayakan keamanan Korea Selatan, dan pasti akan menimbulkan "dampak negatif" pada hubungan antara Seoul dan Moskow. Menlu Korea Selatan juga mendesak Rusia untuk "bertindak secara bertanggung

jawab”, menurut kementerian. Menlu Amerika mendukung tanggapan Korea Selatan terhadap ancaman keamanan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Moskow dan Pyongyang mengatakan masing-masing negara akan segera memberikan bantuan militer jika salah satu negara menghadapi agresi bersenjata (Tempo.co.id 2022).

Sementara sebenarnya Korea Selatan telah lama menuding Korea Utara yang bersenjata nuklir memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina (VOA Indonesia 2022). Pada 2 Oktober 2024, Korea Selatan memanggil duta besar Rusia, untuk memprotes keputusan Pyongyang mengirim ribuan tentara guna mendukung Moskow dalam perang di Ukraina. Kementerian Luar Negeri mendesak penarikan segera pasukan tersebut. Korea Selatan telah lama menuding Korea Utara yang bersenjata nuklir memasok senjata ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Pemimpin Kim Jong Un dan Preside Rusia Vladimir Putin sendiri sebelumnya telah menekan kerja sama militer pada Juni (VOA Indonesia 2022)..

Pemerintah Korea Selatan juga menyatakan kekhawatiran seriusnya mengenai pengiriman pasukan Korea Utara baru-baru ini ke Rusia dan sangat mendesak penarikan segera pasukan Korea Utara. Menurut Badan intelijen Seoul merilis gambar satelit yang menunjukkan gelombang pertama pasukan khusus Korea Utara dari unit elit "Storm Corps" sebanyak 1.500 orang tiba di Vladivostok dengan menggunakan kapal militer Rusia. Kim menyatakan bahwa setiap kerja sama militer antara kedua negara melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan.

Meskipun berulang kali Duta Besar Rusia Zinovyev "menekankan bahwa kerja sama antara Rusia dan Korea Utara, namun tidak ditujukan untuk melawan kepentingan keamanan Korea Selatan, dan menganggap "Korea Utara adalah tetangga dan mitra dekat. Meskipun berbagai protes diberikan Korea Selatan terhadap Rusia tidak akan mengubah apa pun (VOA Indonesia 2022)..

Korea Utara telah mengirim pasukan operasi khusus dari Korps Angkatan Darat Kesebelas yang dikenal sebagai "Korps Badai." Ini adalah pasukan elit yang dilatih untuk misi infiltrasi dan pembunuhan, dengan pelatihan militer lebih banyak daripada wajib militer Rusia baru yang dikirim ke garis depan. Namun, tampaknya tidak mungkin Kim Jong Un akan terus mengirim sejumlah besar tentara elit ke Rusia jika jumlah korban meningkat pada tingkat yang sama dengan jumlah korban Rusia. (Brookngs 2022).

Salah satu risiko yang dihadapi rezim Korea Utara adalah kemungkinan tentaranya meninggalkan medan perang dan berusaha membelot ke Ukraina atau Korea Selatan. Meskipun klaim tersebut belum diverifikasi secara independen, intelijen Ukraina melaporkan bahwa 18 tentara Korea Utara yang ditempatkan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina telah meninggalkan posisi mereka.

Ada kemungkinan bahwa beberapa tentara Korea Utara yang menyerah atau ditangkap oleh pasukan Ukraina mungkin tidak ingin kembali ke Rusia atau Korea Utara. Para tentara ini mungkin mencari suaka atau meminta untuk dipindahkan ke otoritas Korea Selatan.

Tawanan perang Korea Utara mungkin perlu dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa dan akhirnya dikembalikan ke Rusia atau Korea Utara. Namun, menteri pertahanan Korea Selatan menggambarkan pasukan Korea Utara di Rusia sebagai tentara bayaran yang menyamar dengan seragam Rusia dan bertindak di bawah komando militer Rusia, yang menunjukkan bahwa Ukraina mungkin tidak berkewajiban untuk memulangkan tentara Korea Utara yang mencari suaka. Pembelotan pasukan operasi khusus Korea Utara akan menjadi pukulan yang memalukan bagi rezim Kim. (Brookngs 2022).

## **Dampak Kebijakan Pertahanan Rusia Meratifikasi Pakta Pertahanan Utama dengan Korea Utara.**

## **Faktor Determinan Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Meratifikasi Pakta Pertahanan dengan Korea Utara.**

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Howard Lentner dalam bukunya yang berjudul “*Foreign Policy Analysis*” berpendapat bahwa kebijakan luar negeri terletak di antara aspek domestik dan juga aspek internasional dari kehidupan sebuah negara (Howard H. Lentner 1973). Lentner menyebut hal ini sebagai domestic determinant dan foreign determinant, dimana konsep ini memiliki fokus mengenai faktor-faktor yang menjadi penentu dalam terbentuknya sebuah kebijakan luar negeri. Determinan luar negeri mengacu pada keadaan sistem internasional dan situasi pada suatu waktu, sedangkan determinan domestik mengacu pada keadaan di dalam negeri seperti geografi (luas dan posisi wilayah), jumlah penduduk, sumber daya alam, kepemimpinan politik, budaya politik, sikap dan persepsi.

**Determinan domestic** antara lain terdiri dari keyakinan ideologis, preferensi elit politik, persepsi ancaman, opini public, dan juga kekuatan relative (*relative power*) (Balkan Devlen 2009):

### **A. Ideologi dan Prinsip**

Dalam kasus ini, .terkait konflik Ukraina adalah untuk mendemiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Putin, pemimpin Rusia, menganut pandangan irredentist dan imperialis yang menantang legitimasi Ukraina sebagai negara. Irredentisme (Alexander 2022) adalah keinginan suatu negara untuk mencaplok wilayah negara lain . Keinginan ini dapat dimotivasi oleh alasan etnis karena populasi wilayah tersebut secara etnis mirip atau sama dengan populasi negara induk (Alexander 2022).

Secara teori iredentisme ialah tentang bagaimana prnsip yang dianut oleh sebuah negara dan Masyarakat di dalamnya mempengaruhi cara pandang nasional dan juga kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Istilah iredentisme menunjukkan setiap tindakan politik oleh suatu negara atau kelompok etnonasionalis yang didukung oleh negara tersebut untuk mengklaim atau merebut kembali wilayah dari negara tetangga yang berdekatan dengan maksud untuk menyatukan kembali populasi yang tersebar secara geografis yang berbagi bagian kekerabatan etnis dan sejarah yang sama. Hal ini sebagian besar, diikuti dengan penggunaan kekuatan terhadap negara tuan rumah yang menimbulkan ancaman serius bagi sistem keamanan internasional dan pemerintahan global (Kompasiana.com 2022).

Iredentisme Rusia adalah salah satu jenis yang menyebabkan semakin melekatnya isu ini dalam wacana politik global terutama setelah aneksasi Krimea. Rusia yang secara konsisten terus meningkatkan koflik dengan Ukraina sejak Aneksasi Krimea dan subversi Ukraina timur dinilai sebagai kecenderungan iredentisme. Invasi Rusia belum lama ini dinilai menjadi langkah berbahaya yang berisiko terhadap keamanan global dimana Rusia telah mengerahkan senjata dan sistem ofensif dalam jarak serang dari Ukraina, termasuk tank tempur utama, howitzer self-propelled, kendaraan tempur infanteri, sistem peluncuran roket ganda, sistem rudal balistik jarak pendek Iskander, dan artileri derek. Rusia juga telah melengkapi peningkatan konflik ini dengan mengatakan bahwa Ukraina secara historis adalah bagian dari Rusia dan bahwa Kiev perlu kembali ke wilayah Rusia. Kecenderungan iredentis Rusia ini dinilai telah telah menantang kerangka hukum internasional dan pemerintahan global yang menjadi tumpuan tatanan keamanan global pasca Perang Dunia II dan tatanan keamanan Eropa pasca-perang dingin (Alexander 2022).

Iredentisme Rusia ini pada akhirnya telah meningkat menjadi konflik bersenjata, jenis konflik ini dinilai merupakan jenis konflik yang tidak mudah diselesaikan. Ini mungkin memulai perang yang bertahan untuk waktu yang lama. Invasi Ini jelas menantang tatanan politik global untuk menjamin keamanan global. Dalam konflik Iredentis dinilai tidak ada situasi kemenangan bagi kedua belah pihak, sehingga, menang atau kalah menjadi hal yang mutlak. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa Rusia dan Ukraina tidak mundur dan mematuhi perjanjian damai yang telah mereka tandatangani beberapa kali. Namun, perlu dicatat bahwa keterlibatan pihak

ketiga dengan kepentingan proxy masing-masing dalam konflik dapat memiliki kontribusi yang adil dalam menghentikan penyelesaian konflik (Kompasiana.com 2022).

Iredentisme Rusia dapat mengancam keamanan global karena memicu' obsesi nasionalis dan imperialis untuk merebut kembali daerah di luar perbatasannya. Hal tersebut dinilai memberi kepercayaan diri bagi Rusia untuk memajukan klaim irredentisnya atas wilayah Ukraina hingga pada akhirnya melancarkan invasi militer terhadap Ukraina, perilaku seperti itu membuat dunia melabeli Rusia sebagai ekspansionis yang mengancam fondasi tatanan global saat ini, yaitu integritas teritorial dan kedaulatan, sehingga mengancam keamanan global (Alexander 2022) Peninggalan komunisme Uni Soviet sebagai hegemoni terkuat menjadi tandingan terkuat Amerika Serikat dengan Liberlismenya yang kemudian mempengaruhi penerusnya yaitu Rusia dan Korea Utara.

## **B. Preferensi Elit Politik.**

Dalam Preferensi Elit Politik secara teori ialah Terkait bagaimana opini, pengalaman, dan kepentingan elit-elit politik seperti Kementerian yang ada di dalam suatu negara dapat mempengaruhi proses kebijakan negara tersebut. (Foyle 1997). Dalam kasus ini, Rusia mengharapkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta menghindari keterlibatan dalam konflik militer, dan mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Semenanjung Korea. Tujuan-tujuan ini tetap tidak berubah, bahkan setelah gencatan senjata Perang Korea pada tahun 1953.

Sebagai aktor politik dunia, Rusia memiliki struktur kepentingan nasional yang banyak. Mengenai masalah semenanjung Korea, kepentingan nasional Rusia dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. Pertama adalah minat sebagai aktor global. Rusia ingin dikenal sebagai aktor utama dalam tatanan dunia baru yang dipimpin Amerika Serikat..

Kedua, ada kepentingan Rusia untuk menjadi aktor regional yang berpengaruh. Negara ini kehilangan pengaruhnya secara signifikan di Asia Timur pada era pasca-Perang Dingin dan kemudian merasa perlu untuk memulihkannya. Ketiga, kepentingan politik domestik Rusia juga terlibat. Karena wilayahnya yang luas, Rusia mengalami masalah domestik terkait dengan ketidakseimbangan perkembangan lokal. Rusia timur jauh khususnya di Siberia berada di bawah ancaman keamanan serius karena ekonomi terbelakang dan masalah populasi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Rusia memulai rencana jangka panjang untuk mengembangkan daerah-daerah tersebut dan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mengembangkan daerah tersebut (Shin 2008).

Selain itu dalam sumber BBC merangkum tiga alasan mengapa Putin dan Kim Jong-un ingin menjalin 'pertemanan' dalam aksi kunjungan saling balas mereka diantaranya : (BBC Indonesia 2023) **Pertama**, Kepentingan Militer kedua negara. Dimana Rusia membutuhkan senjata, sementara Korea Utara membutuhkan teknologi dari Rusia. Hal tersebut diperkuat oleh Nam Sung-wook, profesor Departemen Unifikasi dan Diplomasi Universitas Korea, mengatakan bahwa agenda inti kunjungan Putin ke Korut adalah “tentang berapa banyak lagi senjata buatan Korea Utara yang akan diberikan kepada Rusia di masa depan.” Dia meyakini bahwa kedua pemimpin itu akan melakukan lebih dari sekedar kesepakatan jangka pendek, yang berpusat pada penyediaan senjata konvensional bagi Korea Utara. Putin dan Kim Jong-un diperkirakan akan menyetujui kerja sama militer yang sangat erat, seperti pengembangan sistem senjata bersama.

Disisi lain, Korea Utara juga diperkirakan akan menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar makanan dan bahan bakar sebagai imbalan atas penyediaan senjata ke Rusia. Profesor Nam memperkirakan bahwa Korea Utara, yang gagal meluncurkan satelit pengintaian militer Mei lalu, akan meminta bantuan teknis dari Rusia tentang teknologi ruang angkasa pada pertemuan ini. Korea Utara akan membutuhkan bantuan dari Rusia, negara yang maju dalam teknologi luar

angkasa, agar dapat meluncurkan lebih banyak satelit. Korea Utara juga diperkirakan akan meminta dukungan teknologi Rusia untuk meningkatkan resolusi satelit pengintai dan mengembangkan kapal selam nuklir. Profesor Nam menilai diskusi apa pun tentang senjata nuklir kemungkinan tidak akan dipublikasi.

Saat ini, Presiden Putin bereaksi sensitif terhadap masuknya senjata Barat ke Ukraina dan mengancam daratan Rusia, bahkan mengisyaratkan kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Namun, kerja sama senjata nuklir di Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut akan memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga dan negara lain seperti Amerika Serikat dan China (BBC Indonesia 2023)

Sejak Agustus 2023, Rusia dilaporkan telah menerima 13.000 kontainer pengiriman yang berisi peluru artileri, roket antitank, dan rudal balistik jarak pendek untuk mengisi kembali amunisi dan senjata Rusia yang sangat menipis. Sekarang menghadapi potensi kekurangan wajib militer, penggunaan pasukan Korea Utara untuk sementara akan meredakan tekanan domestik untuk merekrut lebih banyak orang Rusia musim gugur ini. Pengerahan pasukan asing ke Ukraina juga mengatasi reaksi keras yang dihadapi Putin setelah mengirim wajib militer Rusia baru ke garis depan.

Korea Utara kemungkinan akan menerima keuntungan ekonomi tambahan dan bantuan teknis militer yang lebih besar dari Rusia, mungkin termasuk teknologi satelit dan roket. Setelah menentang program nuklir Korea Utara, Putin sekarang mungkin merasa berguna untuk membantu meningkatkan kemampuan rudal Korea Utara dan sistem pengiriman senjata nuklir. Rusia juga dapat membantu Korea Utara meningkatkan armada kapal selamnya yang sudah tua. Tentara Korea Utara dapat memperoleh pengalaman tempur yang berharga dengan bertempur bersama Rusia dan mampu mengevaluasi secara langsung seberapa efektif teknologinya terhadap senjata dan pertahanan buatan Barat. (Brookings 2022).

**Kedua, Rusia membutuhkan tenaga kerja, sedangkan Korea Utara berharap mata uang asing.** (Brookings 2022).

Rusia dan Korut diperkirakan juga akan membahas perluasan kerja sama ekonomi. Kang Dong-wan, profesor ilmu politik dan diplomasi dari Universitas Dong-A, mengatakan yang paling dibutuhkan Korea Utara dari Rusia adalah "pendapatan devisa dari para pekerja." Korea Utara kemungkinan akan mengirimkan lebih banyak pekerja ke Rusia. Sebaliknya, Rusia juga membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan rekonstruksi bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat perang, serta menghidupkan kembali perekonomian. Kedua pemimpin mungkin akan berdiskusi untuk mendatangkan pekerja migran dari Korut. Alasannya Rusia menghadapi kekurangan tenaga kerja yang parah akibat mobilisasi pasukan dan hengkangnya generasi muda ke luar negeri setelah perang di Ukraina.

Namun, sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara melarang warganya bekerja di luar negeri. Selain itu, seluruh pekerja Korut yang sebelumnya dikirim ke luar negeri pun harus dipulangkan paling lambat tanggal 22 Desember 2019. Oleh karena itu, jika Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan, secara resmi berupaya mempekerjakan pekerja Korea Utara, hal ini kemungkinan besar akan menimbulkan dampak besar di komunitas internasional. Semua perhatian internasional akan tertuju pada bagaimana kedua negara akan menjalankan kerja sama ekonomi di tengah reaksi internasional dan tekanan diplomatik.

**Ketiga, Pertukaran budaya dan pariwisata antar kedua negara** (Brookings 2022).

Rusia telah melanjutkan tur grup pariwisata ke Korea Utara sejak Februari lalu, yang sebelumnya sempat ditangguhkan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, layanan kereta penumpang antara Korut dan Rusia kembali dioperasikan sejak 6 Juni lalu, untuk pertama kalinya sejak empat tahun lalu. Lebih dari 400 wisatawan Rusia mengunjungi Korut dari Februari hingga Mei 2024, Agen perjalanan Rusia, Vostok Intru, telah menawarkan paket tur ke Korea Utara selama lima hari

empat malam dengan harga Rp12,3 juta (US\$750). Di situs agen perjalanan itu juga dicantumkan berbagai produk wisata seperti wisata Gunung Baekdu, wisata sejarah Korea Utara, dan perayaan peringatan Perang Korea. Pariwisata bukan sekadar sarana untuk mendapatkan mata uang asing, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan hubungan melalui pertukaran langsung antarmanusia."

Kunjungan warga Rusia ke Korea Utara sangat membantu dalam meningkatkan hubungan persahabatan kedua negara. Kim Dong-yup menganalisis bahwa dengan meningkatnya kunjungan antarmasyarakat maka saling ketergantungan kedua negara pun semakin kuat, yang dapat berkontribusi dalam meredakan ketegangan militer. Profesor Kim mengatakan kunjungan wisatawan asing juga dapat membantu melunakkan citra Korea Utara sebagai negara tertutup dan berbahaya di mata internasional. Oleh karena itu, pariwisata Korea Utara dinilai sebagai sarana penting pertukaran sosial dan budaya serta peningkatan citra internasional, di luar aspek ekonomi. Namun, baru-baru ini tur kelompok wisata ke Korea Utara dibatalkan karena beberapa turis khawatir dengan meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Agen perjalanan Rusia, Vostok Intur, baru-baru ini juga melaporkan bahwa tur grup empat hari yang dijadwalkan pada 31 Mei dibatalkan karena kurangnya pelamar. Terbatasnya infrastruktur pariwisata dan pembatasan pergerakan orang asing di Korea Utara mempersulit negara ini untuk mengembangkan industri pariwisata. Profesor Kang Dong-wan memperkirakan pertemuan Korea Utara-Rusia ini bisa menjadi kesempatan untuk membahas kerja sama pariwisata (Brookings 2022).

### **C. Persepsi Ancaman.**

Dalam hal ini secara teori terkait kekuatan militer dan kesamaan identitas dapat mempengaruhi persepsi ancaman yang dibuat oleh negara terkait suatu isu. (Bandypadhyaya 1976) Pada kasus ini, adanya tensi ancaman yang tinggi bagi Rusia atas konflik dengan Ukraina dan dukungan negara-negara barat. Dibuktikan Amerika Serikat mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatannya di wilayah Rusia. (BBC Indonesia 2023) Amerika Serikat juga mendukung Ukraina bersama dengan Korea Selatan (Antara News 2022)

Pada 2014, Prof John Mearsheimer dari Universitas Chicago, pencetus teori *offensive realism* menyatakan bahwa sikap Rusia terhadap Ukraina adalah akibat ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa (UE) ke Eropa Timur. (Oegroseno 2022) ekspansi NATO ke Eropa Timur membahayakan Rusia karena hal ini berpotensi memindahkan rudal balistik yang awalnya ditempatkan di Rumania ke Ukraina dan berpotensi menjadi ancaman terbuka bagi Rusia (UII 2022).

Sebelum tahun 2014, Ukraina sangat dekat dengan Rusia dan menjadi buffer zone antara Rusia dan Eropa. Namun setelah revolusi 2014, pemerintah Ukraina berpindah haluan, dari sebelumnya dekat dengan Rusia beralih mendekati NATO. Hal ini menyebabkan Belarusia menjadi satu-satunya buffer zone antara Rusia dan negara-negara Eropa. Sehingga invasi yang dilakukan oleh Rusia menjadi salah satu cara untuk mengembalikan Ukraina sebagai salah satu sekutu Rusia dengan mengganti rezim pemerintah Ukraina melalui dukungan kelompok sepratis di Donetsk, Luhan, dan Krimea. Pendekatan diplomasi dipandang menjadi salah satu solusi meskipun cukup bertele-tele. Hal ini disebabkan legitimasi militer negara-negara di sekitar Rusia belum cukup kuat sehingga apabila memaksakan penyelesaian konflik lewat cara militer malah akan mengarah pada invasi yang lebih besar (UII 2022).

Selain determinan domestik, **keberadaan determinan internasional** juga diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Rusia. Beberapa faktor determinan internasional, antara lain:

#### **a. Tekanan Sistem Internasional.**

Yaitu yang berasal dari Tindakan yang dilakukan oleh negara lain sehingga mempengaruhi system internasional. Dalam kasus ini, Penguatan kerjasama Rusia dan Korea

Utara muncul atas berbagai kecaman global terhadap Rusia terkait konflik dengan Ukraina, hal tersebut membuat peluang bagi Amerika Serikat untuk ikut campur dengan memperkuat sekutunya untuk membantu Ukraina dalam konflik tersebut. Berbagai sanksi ekonomi yang didapatkan membuat Rusia menggandeng kembali Rusia untuk menjadi sekutu terdekatnya dalam menghadapi pertarungan geopolitik yang terjadi.

Rusia menganggap Amerika Serikat diam-diam memasok senjata ke titik panas yaitu Ukraina, dan Amerika dianggap tidak perlu mendikte Rusia tentang cara bertahan. Rusia juga menganggap sanksi yang diterima Rusia tidak akan berpengaruh besar terhadap kepentingan Rusia, dan menganggap bahwa Amerika harus menghilangkan kekuatan sanksinya dan lebih memikirkan hubungan yang setara dengan semua negara. (Detik News 2022)

Rusia tidak ingin Korea Utara berfungsi sebagai negara penyangga (Buffer State) yang menentang Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang, karena ini berarti ketidakstabilan yang berkelanjutan dan konfrontasi di semenanjung Korea. Karena itu, prioritas Rusia adalah menghindari persaingan atau antagonisme diplomatik, dan mendorong kerja sama regional yang luas. Secara umum, Moskow tertarik untuk mencari normalisasi situasi di Semenanjung Korea dan peningkatan kerjasama antar-Korea dan integrasinya dengan dukungan internasional (Alexander 2022).

Rusia ingin memastikan bahwa ada konsekuensi yang terkendali dan dapat diprediksi. Rusia sedang memantau situasi di semenanjung Korea, untuk memperbaiki kebijakannya terhadap unifikasi Korea mengingat perubahan dalam realitas politik, ekonomi dan keamanan di Semenanjung Korea. Pengurangan ketegangan di Semenanjung Korea dan transisi yang baik menuju unifikasi Korea adalah kepentingan bersama, pada tahap ini mereka belum siap untuk mengadopsi langkah-langkah umum untuk mencegah perkembangan tren negatif di Semenanjung Korea dan bersama-sama mendukung tren positif dalam hubungan antar Korea (Alexander 2022).

Dalam rangka meningkatkan stabilitas regional dan kerja sama internasional, Rusia perlu bekerja sama dengan kekuatan regional lainnya dan mendukung pembicaraan-pembicaraan Lima-pihak (Rusia, Cina, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang). Jika tidak, Korea Utara akan menunda reformasi domestik dalam beberapa waktu, dan itu berarti ketidakstabilan berkelanjutan, konfrontasi di semenanjung Korea yang semakin berkepanjangan, dan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk tujuan politik.

Rusia dan negara lainnya telah memiliki pengalaman dalam bekerja sama dengan satu sama lain di Dewan Keamanan PBB di Korea Utara pada tahun 2012–2013. Namun dikarenakan pembicaraan enam pihak (*Six Party Talks*) lumpuh, perlu untuk melanjutkan dialog yang luas antara lima negara. Ini berarti bahwa diskusi tentang masa depan Semenanjung Korea akan diintegrasikan ke dalam pembicaraan tentang masalah politik, keamanan dan ekonomi. Jika kelima negara ini setuju pada keamanan regional dasar, masalah ekonomi dan politik, akan lebih mudah bagi mereka untuk merangsang transisi Korea Utara menuju ekonomi pasar, masyarakat yang lebih terbuka dan untuk mendukung hubungan antar-Korea berskala luas (Saito 2016).

## **b. Peraturan dan Perjanjian Internasional**

Adanya peraturan dan perjanjian internasional dianggap dapat mempengaruhi atau mendasari Tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Dalam kasus ini, Invasi Rusia-Ukraina menyebabkan serangkaian pelanggaran Konvensi Jenewa karena invasi Rusia bersifat agresif terhadap Ukraina dan melanggar prinsip dasar non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara. Tidak diindahkannya perlindungan terhadap warga sipil di Ukraina adalah aspek penting dari Konvensi Jenewa, dan invasi Rusia telah mengakibatkan konflik bersenjata dengan dampak signifikan pada warga sipil, maupun implikasi lainnya yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku dalam Konvensi Jenewa

1949. Terdapat beberapadasar hukum yang dapat digunakan dalam hal ini, misalnya ketentuan Pasal 54, 55 dan 48 dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949 (Rizqiah 2022)

Ditinjau dari konvensi Jenewa, pelanggaran atas invasi Rusia-Ukraina sebagai berikut:

- (1) Pasal 54 Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang: Kekuasaan Pendudukan tidak boleh merubah kedudukan pegawai-pegawai negeri atauhakim di wilayah yang diduduki, atau dengan cara bagaimanapun menggunakan sanksi atau mengambil tindakan paksaan atau diskriminasi apapun terhadap mereka, apabilamereka itu tidak melakukan tugas-tugas mereka karena alasan-alasan hati nurani mereka. Larangan ini tidak mengurangi berlakunya paragraf kedua dari
- (2) Pasal 51. Larangan ini juga tidak mengurangi hak Kekuasaan Pendudukan untuk memecat pegawai negeri dari jabatan mereka.
- (3) Pasal 55 Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka, Sakit danKorban Kapal Karam di Laut
- (4) Pasal 48 Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang: Orang-orang yang dilindungi yang bukan warganegara Negara yang wilayahnyadiduduki, dapat menggunakan hak mereka untuk meninggalkan wilayah denganmengingat ketentuan-ketentuan
- (5) Pasal 35. Keputusan-keputusan mengenai hal itu akandiambil menurut prosedur yang akan ditetapkan oleh Kekuasaan Pendudukan sesuai dengan pasal tersebut

Invasi Rusia ke Ukraina harus mematuhi ketentuan hukum internasional terkait operasi militer, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Piagam PBB, terkait hak Negara untukmelakukan pembelaan diri secara individual atau kolektif dengan pakta pertahanan. Ukrainamerasa bahwa Rusia telah melakukan separatism atau pemberontakan yang mengangguintegritas kedaulatan Ukraina atas wilayah negaranya (Mulvey 2022).

Perspektif hukum internasional memandang penggunaan kekerasan sebagai hal yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Konvensi PBB, penyelesaian sengketa antar Negara dapat dilakukandengan: (Mulvey 2022)

a. Reprisal (Pembalasan) Pembalasan merupakan suatu metode yang dipakai oleh Negara yangbersengketa untuk membalas tindakan yang dilakukan Negara lain, yaitu tindakan yangmelanggar hukum dari Negara lawannya dalam suatu sengketa, reprisal padahakekatnya berbeda dengan restorsi dimana perbuatan restore merupakan perbuatanyang tidak melanggar hukum, sedangkan reprisal adalah perbuatan yang melanggar hukum yaitu untuk menghentikan perbuatannya yang melanggar hukumperanginternasional (Obayemi 2006)

b. Blokade Massa Secara Damai Blokade dilakukan ketika perang terhadap pelabuhan Negara yang dilakukanoleh angkatan laut, namun blokade ini hanya dapat dilakukan dalamkeadaan damai sebagai pengepungan wilayah yang dikategorikan sebagai tindakan pembalasan untukmemaksa Negara yang diblokade untuk memenuhi pemrintaan Negara yangbersangkutan atas ganti rugi dari pihak Negara yang memblokade (Obayemi 2006).

c. Melakukan Perang antar Negara Perang merupakan upaya terakhir yang dilakukan suatu Negara untukmenyelesaikan sengketa internasional, perang tentunya akan menghasilkan efek negatif seperti korban jiwa, kerusakan dan-lain-lain yang harus diderita kedua belah Negarayang bersangkutan karena menggunakan kekuatan militer bersenjata (Obayemi 2006).

Selain adanya pelanggaran Rusia terhadap Konvensi Jenewa tersebut juga mengakibatkan muncul berbagai sanksi yang diterima dari negara-negara Barat. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022, AS, Inggris dan Uni Eropa, bersama negara-negara lain termasuk Australia, Kanada, dan Jepang, telah menerapkan lebih dari 16.500 sanksi terhadap Rusia (BBC Indonesia 2023). Selain itu sekitar 70% aset bank-bank Rusia juga dibekukan, menurut Uni Eropa, dan beberapa di antaranya dikeluarkan dari Swift, layanan pesan berkecepatan tinggi untuk lembaga

keuangan. AS dan Inggris melarang minyak bumi dan gas Rusia. Sementara Uni Eropa melarang impor minyak mentah melalui laut. Kelompok G7 yaitu organisasi yang terdiri dari tujuh negara dengan ekonomi paling maju di dunia juga telah memberlakukan harga maksimum US\$60 (sekitar Rp938.790) per barel untuk minyak mentah Rusia, demi mencoba mengurangi pendapatan Rusia.

Selain itu, Pemerintah Kanada juga memberikan sanksi meliputi: Pembatasan terhadap 58 individu dan entitas Rusia, termasuk bank, elit keuangan, dan keluarga mereka Sanksi terhadap anggota Dewan Keamanan Rusia Pembatasan pada empat orang Ukraina "atas kolaborasi mereka dengan Rusia untuk mengacaukan Ukraina" Kemudian Kanada melakukan pembatasan ekspor ke Rusia dengan menghentikan izin ekspor baru dan membatalkan izin ekspor yang sah. Kanada juga mendukung pemotongan beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan SWIFT (Kompas 2022). Diikuti oleh Pemerintah Jepang mengatakan akan memberikan sanksi kepada Putin dan pejabat pemerintahan Rusia lainnya. Jepang juga mendukung pemutusan beberapa bank Rusia dari jaringan SWIFT, yang disusul Australia dan Selandia baru yang menetapkan larangan perjalanan dan konsekuensi keuangan kepada anggota Dewan Keamanan Rusia, serta larangan ekspor ke militer Rusia.

Ratusan perusahaan besar, termasuk McDonald's, Coca-Cola, Starbucks dan Heineken telah berhenti menjual dan memproduksi barang di Rusia. Namun, beberapa masih melakukan bisnisnya di Rusia. PepsiCo, misalnya, dituduh terus menjual produk makanan di Rusia. BBC juga menemukan bahwa perusahaan kosmetik Amerika, Avon, membuat barang di sebuah pabrik dekat Moskow. Negara-negara Barat lainnya pun juga menerapkan larangan ekspor teknologi Rusia yang mungkin digunakan untuk pembuatan senjata; larangan impor emas dan permata dari Rusia; larangan penerbangan dari Rusia.

Hal tersebut mengakibatkan Rusia berupaya mengoptimalkan pembelian dari negara lain seperti Georgia, Belarusia, dan Kazakhstan, serta China dan Korea Utara (BBC Indonesia 2023). Namun hal tersebut secara tidak langsung berdampak besar pada perekonomian Rusia. Pada 2022 dimana tahun pertama Perang Ukraina berlangsung ekonomi Rusia menyusut 2,1%, menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Akan tetapi, IMF memperkirakan bahwa ekonomi Rusia tumbuh 2,2% pada 2023 dan memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1% pada 2024. Perang di Ukraina dan sanksi telah menyebabkan lebih dari satu juta orang banyak dari mereka adalah generasi muda dan berpendidikan tinggi justru meninggalkan Rusia. Pemerintah Rusia juga telah memangkas dana kesehatan dan mengalokasikannya untuk perang di Ukraina (BBC Indonesia 2023)

Selain adanya pemutusan hubungan dan sanksi ekonomi dari ni Eropa telah melarang semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya untuk berdagang atau berinteraksi dengan Rusia di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut dilarang mengekspor teknologi ke perusahaan pengembang teknologi dan produsen senjata Rusia JSC Kalashnikov. Selain JSC Kalashnikov, terdapat beberapa perusahaan Rusia yang masuk daftar pelarangan EU, antara lain sebagai berikut: Produsen pembuat senjata Almaz-Antey Perusahaan pembuat truk Perusahaan pengembang teknologi pertahanan Rostec Produsen pembuat kapal selam nuklir Sevmash Perusahaan pembuat kapal United Shipbuilding Corporation. Selain itu EU juga memblokir Internet Research Agency yang dinilai telah digunakan Rusia untuk mengkampanyekan informasi yang salah atas Ukraina. Internet Research Agency merupakan perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap opini publik pada platform internet yang dikendalikan pemerintah Rusia. Kemudian, UE juga membatasi ekspor barang dan teknologi yang bisa digunakan untuk kalangan militer dan non militer (dual use goods and technology). Salah satu yang dibatasi dalam klasifikasi tersebut adalah ekspor semikonduktor yang kerap dipakai untuk membuat chipset laptop dan ponsel. Uni Eropa juga sepakat untuk menutup wilayah udara bagi maskapai Rusia dan melarang beberapa media pro-Kremlin pada 22 Februari 2022. (Kompas 2022).

**c. Pola interaksi antara negara-negara yang terlibat, baik kerja sama, kompetisi, anarki, dan lain-lain.**

Pola interaksi antara Rusia dan Ukraina yang pada momentum yang sama sama-sama menghadapi ancaman hegemoni Barat pada Konflik di Ukraina dan dengan Korea Selatan. Berbagai dukungan Amerika Serikat dan sekutunya melalui kerjasama, serta tekanan dunia Barat dan PBB terkait konflik yang dialami oleh Rusia dan Korea Utara membuat kedua negara tersebut bersatu untuk menyeimbangkan kekuatan dan berkompetisi kekuatan militer ditengah kondisi anarki.

Adanya keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO sejak Urgensi Ukraina untuk masuk NATO sejak Rusia berani mencaplok Crimea pada 2014, disambut baik oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jens Stoltenberg pada 2023 yang menyarankan Ukraina bisa menjadi anggota aliansi tanpa persetujuan anggota (CNN Indonesia 2022). Stoltenberg mengatakan kepala negara anggota NATO "memberi sinyal positif" terkait keanggotaan Ukraina, dan menghapus persyaratan untuk Rencana Aksi Keanggotaan (Membership Action Plan/MAP) untuk Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan akan membahas peta jalan untuk keanggotaan Ukraina di NATO selama pertemuan di Vilnius (CNN Indonesia 2022).

Dengan adanya pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia akan menunjukkan bahwa Pyongyang "seungguhnya" diharapkan akan membantu upaya perang Rusia yang tidak adil di Ukraina. Sementara bagi Korea Utara sebelumnya dikenal karena ancaman siber, pencucian uang, perdagangan senjata, dan aktivitas perdagangan gelapnya, perkembangan baru ini dapat membuat Pyongyang berani untuk berpartisipasi dalam konflik lain yang sedang berlangsung dan perang di masa mendatang atas nama mitra yang berpikiran sama yang menentang Barat (Brookings 2022).

Bagi Rusia, adanya bantuan Amerika Serikat terhadap Ukraina dibuktikan dengan adanya Keputusan Kongres terkait lima RUU yang mengalokasikan \$175 miliar sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Meskipun sebagian besar pengeluaran ini adalah bantuan yang diberikan kepada pemerintah Ukraina, dimana sebanyak \$106 miliar yang secara langsung membantu pemerintah Ukraina. Sebagian besar sisanya mendanai berbagai kegiatan Amerika yang terkait dengan perang di Ukraina, dan sebagian kecil mendukung negara-negara lain yang terkena dampak di kawasan tersebut. Selain itu juga digunakan untuk membayar pabrik dan pekerja Amerika guna memproduksi berbagai senjata yang dikirim ke Ukraina (Council on Foreign Relations 2022). Bantuan Amerika tersebut menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Rusia untuk memperkuat kekuatan militer dengan sekutunya.

Sama halnya terkait konflik di Semenanjung Korea, bagi Korea Utara dukungan Amerika Serikat melalui NATO dan sekutu Barat kepada Korea Selatan menjadi ancaman terbesar sehingga pada saat Rusia mengalami berbagai sanksi ekonomi Barat, menjadi momentum yang pas bagi Korea Utara untuk bersedia memperkuat aliansi kedua negara tersebut. Hal tersebut sejalan dengan *Balance of Power* (BOP) yang dilakukan oleh Pemerintah Rusia yaitu menyeimbangkan kekuatan hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Dalam konsep *BOP* menciptakan perdamaian karena jika distribusi power dilakukan secara seimbang diantara berbagai negara dan aliansinya, maka tidak akan ada yang dapat memperoleh kekuatan lebih besar; sebagai jaminan keamanan dalam tindakan-tindakan agresif negara.

Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan sebelumnya yaitu tujuan dari *balancing* menurut Sheehan adalah dengan membendung kekuatan hegemoni dengan cara perimbangan kekuatan sistemik, maka pembentukan aliansi dan komunitas internasional merupakan cara yang sesuai. Beliau kemudian menjelaskan bahwa pada umumnya negara yang merasa terancam akan eksistensi hegemoni dikarenakan ketidaksetaraan kekuatan, maka sangat tidak mungkin apabila

untuk menghadapi ketidaksetaraan tersebut dengan cara eskalasi kekuatan secara mandiri, akan lebih memungkinkan apabila kekuatan disatukan dalam sebuah struktur sistemik sehingga penyeimbangan berada dalam mekanisme keamanan internasional yang dapat menyeimbangkan kekuatan dari hegemon.

Dalam hal ini jelas Amerika Serikat dan aliansinya melalui NATO, serta negara-negara Barat yang berada pada posisi Ukraina dan Korea Selatan memancing upaya *Hard Balancing* Rusia untuk memperkuat kekuatannya dengan aliansinya. Sebagaimana menurut teori bahwa *Hard Balancing* merupakan strategi yang sering dipamerkan oleh negara-negara yang terlibat sangat intens dalam hal persaingan. Sehingga negara mengadopsi strategi untuk membangun dan mempengaruhi kemampuan militer yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk memelihara aliansi dan *conteralliances* yang di gunakan untk mencocokkan kemampuan dari rivalnya. *Hard balancing* ini lebih sering di gunakan dalam konsepsi pandangan realis secara tradisional maupun neorealis. (Rismawan 2018).

Sehinga faktor tersebut menjadi salah satu determinan kebijakan luar negeri Rusia terkait penguatan aliansi dengan Korea Utara, yang juga sejalan dengan yang dikemukakan dalam perspektif Neo-Realisme Klasik pun juga menjelaskan bahwa Realisme neoklasik berkaitan dengan sumber dan penggunaan kekuatan nasional dalam politik internasional dan permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin dalam membuat kebijakan luar negeri (Lobell 2009) Faktor determinan domestic dan luar negeri diatas menjadi alasan kebijakan Rusia dalam memperkuat aliansi dengan Korea Utara ditengah meluasnya pengaruh Barat di Kawasan Asia Utara dan Eropa Timur, Kawasan Semenanjung Korea, dan Kawasan Asia Pasifik.

### **Proyeksi Pengaruh Pakta Pertahanan Rusia dan Korea Utara terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan.**

Dengan keterlibatan Korea Utara dalam perang Rusia dan Ukraina, di proyeksikan akan semakin memperluas dan meningkatkan pertempuran dengan Ukraina karena kemampuan Rusia yang semakin besar pasca aliansi tersebut (Jurnal Patroli News 2022). Hal tersebut terlihat pada saat Korea Utara melakukan pengiriman persenjataan dan pengerahan 10.000 prajurit untuk perang ilegal Rusia terhadap Ukraina, menimbulkan kekhawatiran strategis dan hukum yang signifikan bagi Indo-Pasifik. Langkah itu menandakan semakin dalamnya aliansi di antara kedua rezim otoriter yang berupaya melawan pengaruh Amerika Serikat beserta Sekutu dan Mitranya serta memiliki implikasi luas bagi keamanan regional (IP Defense Forum 2024).

Ditambah lagi situasi setelah perang di Ukraina dan kepemilikan Korea Utara atas senjata nuklir, strategi diplomatik Rusia dan Korea Utara kini menantang pengaruh Amerika Serikat menuju tatanan dunia yang multipolar. (Berkas DPR.go 2022). Ancaman bagi negara-negara dunia khususnya negara-negara di Kawasan Asia Timur. AS sebagai salah satu negara anggota tetap DK PBB dan juga merupakan pusat hegemoni dunia merasa bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan masalah terkait pengembangan program nuklir Korea Utara ini, apalagi AS juga memiliki kepentingan di Kawasan Asia Pasifik dan keberadaan negara aliansinya di kawasan yang tidak stabil akibat nuklir Korea Utara tersebut. Oleh sebab itu, salah satu tindakan yang diambil oleh AS untuk menekan Korea Utara agar tidak semakin agresif dalam mengembangkan nuklir miliknya adalah dengan memperkuat sektor keamanan di wilayah Semenanjung Korea.

Kolaborasi Korea Utara-Rusia memenuhi kepentingan timbal balik kedua rezim, membantu mesin perang Moskow sembari memperkuat ikatan Korea Utara dengan sekutu yang memiliki kemampuan persenjataan nuklir. Hubungan ini memberikan pengaruh bagi Pyongyang dalam hubungannya dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia ketika negara yang terisolasi ini berupaya memperkuat posisinya dalam melawan aliansi di Indo-Pasifik. Implikasinya terhadap keamanan Indo-Pasifik sangat besar. Korea Utara yang semakin berani, yang didukung oleh Rusia,

mungkin bertindak lebih agresif, sehingga meningkatkan risiko konflik di berbagai titik rawan seperti Semenanjung Korea dan Selat Taiwan. Hal ini dapat mendorong respons militer yang lebih kuat dari kekuatan regional, termasuk peningkatan koordinasi pertahanan di antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat (Berkas DPR.go 2022).

Hal tersebut mengakibatkan negara-negara Indo-Pasifik terus meningkatkan kerja sama regional. Memperkuat kemitraan seperti pengelompokan Quad yang terdiri dari Australia, India, Jepang, dan A.S., serta memperkuat ikatan dengan 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dapat menangkal agresif Korea Utara. Sementara itu, upaya diplomatik untuk mengisolasi Rusia dan Korea Utara seharusnya disertai dengan sanksi tertarget berkelanjutan untuk membatasi kolaborasi militer mereka.

Dengan demikian, dukungan militer Korea Utara terhadap Rusia tidak hanya meningkatkan konflik Ukraina tetapi juga meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakstabilan di Indo-Pasifik. Respons internasional terkoordinasi dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keamanan regional dan menjunjung tinggi hukum internasional.

Kehadiran pasukan Korea Utara di Rusia memiliki setidaknya dua implikasi jangka Panjang: (Brookings 2022) Pertama, Putin telah menunjukkan lagi bahwa, jauh dari terisolasi, negara-negara bersedia mendukung Rusia selama perangnya di Ukraina. Upaya yang telah dilakukan Korea Utara untuk memungkinkan perang Putin dapat mendorong negara-negara lain untuk memperkuat hubungan militer bilateral mereka sendiri dengan Rusia; Iran, misalnya, dapat meningkatkan kerja samanya dengan Rusia karena bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi dengan Israel.

Kedua, kerja sama militer Rusia-Korea Utara yang lebih mendalam terjadi pada saat ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Ini termasuk penghancuran jalan dan rel kereta api antar-Korea baru-baru ini oleh Korea Utara dan dugaan serangan pesawat nirawak Korea Selatan ke Korea Utara bulan ini. Keputusan Korea Utara untuk mengirim pasukan ke Rusia secara tidak langsung menunjukkan bahwa Korea Utara sedang memperkuat posisi strategisnya terhadap Korea Selatan. (Brookings 2022)

## **KESIMPULAN**

Konstelasi geopolitik kontemporer, yang diwarnai oleh konflik berkepanjangan di Eropa Timur dan ketegangan di Semenanjung Korea, telah menciptakan momentum strategis bagi penguatan aliansi antara Federasi Rusia dan Korea Utara. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, kebijakan luar negeri Rusia untuk meratifikasi pakta pertahanan dengan Korea Utara merupakan sebuah respons strategis yang dimotivasi oleh perpaduan antara tekanan sistemik internasional dan imperatif domestik, sejalan dengan kerangka teori Neo-Realisme Klasik yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada level internasional, faktor determinan yang paling dominan adalah upaya balancing terhadap hegemoni Amerika Serikat dan aliansinya dalam struktur sistem yang anarkis. Aliansi ini merupakan langkah counter-balancing langsung terhadap strategi AS yang memperkuat mitranya di Ukraina dan Korea Selatan. Namun, tekanan eksternal ini diperkuat oleh determinan domestik yang tidak kalah penting. Preferensi elite politik Rusia yang pragmatis melihat aliansi ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mendesak di sektor militer, ekonomi, dan budaya guna mempertahankan posisi strategis Rusia dalam menghadapi konflik di Ukraina dan persaingannya dengan kekuatan Barat.

Implikasi dari kebijakan ini terproyeksi secara signifikan pada tatanan regional dan global. Secara langsung, pakta ini memicu respons negatif dari negara-negara Barat dan mengakselerasi pembentukan tatanan dunia yang lebih multipolar. Lebih jauh, pakta ini tidak hanya berpotensi memperburuk eskalasi konflik di Ukraina dan Semenanjung Korea, tetapi juga secara fundamental mengancam stabilitas keamanan regional di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa. Pada akhirnya, penguatan poros Moskow-Pyongyang ini berkontribusi pada erosi arsitektur keamanan global yang telah mapan, menciptakan ketidakpastian yang lebih besar bagi komunitas internasional secara menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Balkan Devlen, Ozgur Ozdamar. 2009. *Neoclassical Realism And Foreign Policy Crises*”, *Rethinking Realism In International Relations Between Tradition And Innovation*.
- Bandypadhyaya, Jayanatanuja. 1976. "National Character And International Relations." *Internatiional Studies* 532.
- Brookings. n.d. ""What do North Korean Troop Deployments to Russia Mean For Geopolitics”."
- Creswell, John W. Creswell Dan J. David. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches 5th Edition*. Sage Publications.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Defence Intelligence Agency. 2017. "Russia Military Power:Building a Military to Support Great Power Aspirations." *Washington D.C* 16-17.
- Douglas Foyle. "Public Opinion And Foreign Policy: Elite Beliefs As A Mediating Variable". *International Studies Quarterly*. 1997.
- Ford, Arthur P. 2009. *Denting The Hub, Or Strengthening The Spokes? A Neoclassical Realism Analysis Of New Security Trends In The Pacific*. Alabama: School Of Advanced Air And Space Studies Air University Maxwell Air Force Base.
- Foyle, Douglas. 1997. *Public Opinion And Foreign Policy: Elite Beliefs As A Mediating Variable*". *International Studies Quarterly*.
- Jayanatanuja Bandypadhyaya. "National Character And International Relations". *Internatiional Studies*, 1976. Halaman 532.
- Kitchen, Nicholas. 2010. 'Systemic Pressures And Domestik Ideas: A Neoclassical Realist Model Of Grand Strategy Formation', *Review Of International Studies*, Vol. 36, No. 1, Pp. 117-143.
- Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, Dan Jeffrey W. Taliaffero. 2009. *Neoclassical Realism, The State, And Foreign Policy*. New York: Cambridge University Press.
- Mardalis. Jakarta. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. 1995: Bumi Aksara.

- Maulana., Arya Wirawan. 2020. "Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Terhadap Korea Utara Dalam Proses Denuklirisasi Korea Utara PAsca Six Party Talks (Periode 2009-2013)." *Universitas Isla Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Edisi Revisi (Bandung, 2006) Hlm: 10.
- Obayemi, Olumnide K. 2006. "'Legal Standards Governing Pre-Emptive Strikes and Forcible Measures of Anticipatory Self-Defense under the U.N. Charter and General International Law.'" *Annual Survey of International & Comparative Law*, 12 (1).
- Plano, Jack. J, and Olton Roy. 1982. *The International Relations Dictionary, Third. Editions*. California: Western Michigan University, ABC-Clio.
- Pradana, Mas Rusdinar Septia. Desember 2013. "Kebijakan Luar Negeri Rusia dalam Six-Party Talks Krisis Senjata Nuklir Korea Utara." *Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Bandung*.
- Rismawan, Arry. 2018. "Kebijakan Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Pemberlakuan Sanksi Ekonomi Dan Militer Bagi Korea Utara." *Perpustakaan*.
- Rosyidin, Mohamad. 2010. 'Integrasi Struktur Dan Unit: Teori Politik Luar Negeri Dalam Perspektif Realisme Neoklasik', *Global*, Vol.10, No.2, Pp. 150-163
- Saito, Motohide. 2016. "Russian North Korea Policy: Current Status and Future Outlook." 166-168.
- Secretariat Cairo. 1995. "United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders."
- Shin, Beom-Shik. 2008. "Russia's Northeast Asian Policy and Korean Peninsular." *The Journal of East Asia Affairs*, Vol 22. No.2 63-195 .
- Werner Levi,. "Ideology, Interest, And Foreign Policy". *International Studies Quarterly Vol. 14. Noo 1, 1970*. Halaman 3.

### Internet

- Tempo Internasional. 2022. *Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang Mengutuk Kerja Sama Militer Moskow Pyongyang*. Accessed 2024. <https://www.tempo.co/internasional/amerika-serikat-korea-selatan-jepang-mengutuk-kerja-sama-militer-moskow-pyongyang-45861>.
- Tempo.co.id. 2022. *Korea Selatan Panggil Duta Besar Rusia Karena Kesepakatan dengan Korea Utara*. Accessed 2024. <https://www.tempo.co/internasional/korea-selatan-panggil-duta-besar-rusia-karena-kesepakatan-dengan-korea-utara-47101>.
- Tempo.com. 2022. *Korea Utara dan Rusia Sepakat Kompak Saling Bantu Bila Dserang*. Accessed 2024. <https://www.tempo.co/internasional/korea-utara-dan-rusia-sepakat-kompak-saling-bantu-bila-diserang--1163034>.
- UII. 2022. *Konflik Ukraina Rusia Bagian dari Sisa Sisa Perang Dingin*. Accessed 2024. <https://www.uii.ac.id/konflik-ukraina-rusia-bagian-dari-sisa-sisa-perang-dingin/>.
- VOA Indonesia. 2022. *Seoul Desak Penarikan Segera Pasukan Korea Utara dari Rusia*. Accessed 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/seoul-desak-penarikan-segera-pasukan-korea-utara-dari-rusia/7830217.html>.

- Rizqiah, Rachmadyantira, Maharani, Angkasari. 2022. *Pelanggaran Hukum Pada Invasi Rusia-Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa*. Accessed 2024. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/teras-Lrev/index>.
- RCTI Plus.com. 2022. "Mengulik Sejarah Hubungan Rusia dan Korut ternyata Tidak Selalu Mesra". Accessed 2024. <https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/4411312/mengulik-sejarah-hubungan-rusia-dan-korut-ternyata-tidak-selalu-mesra>.
- Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Setjen DPR RI. 2023. *Peningkatan Hubungan Rusia dan Korea Utara*. Accessed 2024. [https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Isu\\_Sepekan/Isu%20sepekan---Iii-Puslit-Juni-2024-238.Pdf](https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Isu_Sepekan/Isu%20sepekan---Iii-Puslit-Juni-2024-238.Pdf)
- Pacis Unpar. 2022. *Kemitraan Strategis Rusia Korea Utara*. Accessed 2024. <https://pacis.unpar.ac.id/kemitraan-strategis-rusia-korea-utara/>
- Oegroseno, Arif Havas. 2022. *Iredentisme Di Ukraina*. Accessed 2024. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/18/iredentisme-di-ukraina>.
- Mulvey, S. 2022. "Ukraina diserbu Rusia: Presiden Volodymyr Zelensky, dari komedian menjadi pemimpin perang meyakinkan dalam melawan Putin." *BBC.com*. Accessed 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60554780>.
2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/05/123000765/daftar-sanksi-yang-dijatuhkan-kepada-rusia-at>.
- Kompas Internasional. 2022. *Bak Roller Coaster Begini Kilas Balik Hubungan Rusia dan Korea Utara*. Accessed 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2019/04/25/12553101/bak-roller-coaster-begini-kilas-balik-hubungan-rusia-dan-korea-utara?page=all>.
- Kompas.com. 2023. *20 Poin Penting Perjanjian Kemitraan Rusia dan Korea Utara*. Accessed 2024. <https://www.kompas.com/global/read/2024/06/20/162700270/20-poin-penting-perjanjian-kemitraan-rusia-dan-korea-utara?page=1>.
- Kompas.com, . 2023. *Rusia: Kerja Sama Militer dengan Korea Utara Tidak Melanggar Hukum Internasional*. Accessed 2024. <https://www.kompas.com/global/read/2024/10/31/170000870/Rusia-Kerja-Sama-Militer-Dengan-Korea-Utara-Tidak-Melanggar-Hukum>.
- Kompasiana.com. 2022. *Tantangan Keamanan Global Iredentisme Konflik Rusia Ukraina*. Accessed 2024. <https://www.kompasiana.com/tari3993/62270506bb44864c100b4d42/tantangan-keamanan-global-iredentisme-konflik-rusia-ukraina>.
- Kompas. 2022. *Daftar Sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia atas Invasi Ukraina Apa Saja*. Accessed
- Howard H. Lentner. 1973. *Foreign Policy Analysis: Comparative and Conceptual Approach*. Merril.
- Internasional Kompas. 2022. *Pasang Surut Hubungan Rusia dan Korea Utara*. Accessed 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2024/02/26/163450470/pasang-surut-hubungan-rusia-dan-korea-utara>,
- International Crisis Group. 2020. *Afghanistan Peace Talk Since 2018: A Timeline*. Agustus 11. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-between-february-2019-and-august-2020-timeline>.
- IP Defense Forum. 2024. *Ikatan Militer Korea Utara-Rusia Memerlukan Respons Terkoordinasi untuk Menjaga Stabilitas Konflik Indo-Pasifik*. Accessed 2025.

<https://ipdefenseforum.com/id/2024/11/ikatan-militer-korea-utara-rusia-memerlukan-respons-terkoordinasi-untuk-menjag>.

- Jurnal Patroli News. 2022. "Korut Bergabung Perang Rusia Ukraina Pakta Pertahanan." *Jurnal Patroli News*. Accessed 2024. <https://jurnalpatrolineews.co.id/headline/korut-bergabung-perang-rusia-ukraina-pakta-pertahanan/>.
- Katzman, Kenneth, and Clayton Thomas. 2017. *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Kementerian Sekretaris Negara. 2021. *Indonesia-Afghanistan Sepakat Tingkatkan Kerjasama*. April 6. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.setneg.go/>.
- Detik News. 2022. "AS Sorot Kerja Sama Militer dengan Korut Rusia Geram". Accessed 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-6930556/as-sorot-kerja-sama-militer-dengan-korut-rusia-geram/2>.
- Brookings. 2022. "What do North Korean Troop Deployments to Russia Mean For Geopolitics". Accessed 2024. <https://www.brookings.edu/articles/what-do-north-korean-troop-deployments-to-russia-mean-for-geopolitics/>.
- CNBC Indonesia. 2022. *Tentara Korut Pakai Seragam Rusia Bergerak ke Ukraina-Nato Merespons*. Accessed 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241031050407-4-584408/tentara-korut-pakai-seragam-rusia-bergerak-ke-ukraina-nato-merespons>.
- CNBC Indonesia, . 2024. *Putin-Kim Jong Un Teken Pakta Perjanjian Pertahanan, AS Cs Panik*. Accessed 2024. Online:<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620050803-4-547646/putin-kim-jong-un-teken-pakta-perjanjian-pertahanan-as-cs-panik>.
- CNN Indonesia. 2022. *Sekjen Nato Usul Ukraina Gabung Tanpa Restu Anggota*. Accessed 2025. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230711193114-134-972249/sekjen-nato-usul-ukraina-gabung-tanpa-restu-negara-anggota>.
- Council on Foreign Relations. 2022. *How Much U.S. Aid Is Going to Ukraine?* Accessed 2025. <https://www.cfr.org/article/how-much-us-aid-going-ukraine>.
- BBC Indonesia. 2023. *Tiga alasan mengapa Vladimir Putin akan bertemu Kim Jong Un di Korea Utara*. Accessed 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pp1l1915eo>.
- BBC News. 2023. *Vladimir Putin dan Kim Jong Un berikrar saling bantu melawan 'agresi', apa artinya?* Accessed 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cw00rynxez5o>.
- BBCNews. 2022. *"Sejarah Hubungan Rusia dan Korea Utara"*. Accessed 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5q4ejz9evo>.
- Berkas DPR.go. 2022. *Isu Sepekan Rusia-Korea Utara*. Accessed 2024. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu\\_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2024-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2024-238.pdf).
- AA.com. 2023. *Korea Utara ratifikasi pakta pertahanan utama dengan Rusia*. Accessed 2024. Korea Utara ratifikasi pakta pertahanan utama dengan Rusia, Online: <https://www.aa.com.tr/id/dunia/korea-utara-ratifikasi-pakta-pertahanan-utama-dengan-rusia/3392274>.
- Abou-Zahr, Sawssan. 2019. *Peace Dispatch: March 2019*. Maret 23. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peace-dispatch-march-2019/?location=nigeria&theme=conflict-prevention-early-warning>.
- Alexander, Chris. 2022. "Boarders, Irredentism, & Russian". Accessed 2024. [https://thecic.org/wp-content/uploads/2020/09/Behind-the-Headlines\\_Chris\\_Alexander\\_1.pdf](https://thecic.org/wp-content/uploads/2020/09/Behind-the-Headlines_Chris_Alexander_1.pdf).

Antara News. 2022. *Kecam Kerja Sama Militer yang Makin Erat Antara Rusia dan Korut*. Accessed 2024.  
<https://www.antaraneews.com/berita/4163196/as-kecam-kerja-sama-militer-yang-makin-erat-antara-Rusia-Korea-Utara>.